

BAB IV

SEBAB-SEBAB PENOLAKAN KOREA SELATAN UNTUK BERGABUNG DALAM *TRILATERAL MILITARY ALLIANCE*

Sebuah kerjasama antar negara pasti dilakukan untuk tujuan yang menguntungkan semua pihak, termasuk terbentuknya sebuah aliansi. Adanya kesamaan dalam berbagai faktor menyebabkan negara cenderung untuk melakukan kerjasama hingga aliansi. Namun untuk kasus Korea Selatan, mereka justru menolak untuk membentuk sebuah aliansi militer bersama Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sebab-sebab penolakan Korea Selatan untuk bergabung dalam *trilateral military alliance* yang diusung oleh AS. Pembahasan dalam bab ini akan menggunakanacamata *decision making theory*.

A. Politik Domestik Korea Selatan di Era Pemerintahan Moon Jae In

1. Mass Influencers

Korea Selatan memiliki Presiden baru yang diangkat Mei 2017 lalu menggantikan Park Geun Hye. Moon Jae In, dari Partai Demokrat yang liberal menang dengan memperoleh 41.1% suara (Mosler, 2017, hal. 1). Moon Jae In merupakan President pertama yang terpilih dari partai liberal setelah kurang lebih satu dekade Korea Selatan dipimpin oleh partai konservatif.

Selama masa kampanye, Moon Jae In telah menyampaikan tujuan-tujuan yang akan ia capai selama 5 tahun ke depan, salah satunya adalah Korea Selatan yang damai dan sejahtera. Maksud dari prinsip ini adalah denuklirisasi Semenanjung Korea dan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Sehingga upaya perbaikan hubungan antar-Korea ini memang telah menjadi perhatian bagi Moon Jae In.

Ketika terpilih menjadi Presiden, Moon Jae In telah dihadapkan dengan serangkaian tantangan baik secara domestik maupun internasional. Kemenangan Moon didukung oleh keberhasilannya menarik perhatian masyarakat Korea Selatan yang meminta kepada calon Presiden untuk berfokus pada isu domestik, terutama isu korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran khususnya bagi pemuda dan besarnya pengaruh politik yang diberikan oleh konglomerat di Korea Selatan (Altbach, 2017, hal. 1).

Mengenai pandangan masyarakat Korea Selatan tentang Korea Utara, dilansir oleh Asan Public Opinion Report, pandangan mengenai reunifikasi dengan Korea Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan image Korea Utara yang awalnya negatif dimana masyarakat memandang negara tersebut sebagai ancaman dan perlu diselesaikan dengan cara yang *hardcore*. Kini berangsur-angsur menjadi lebih positif dimana masyarakat menyatakan bahwa Korea Utara bukanlah musuh melainkan saudara satu nenek moyang. Kemudian pandangan skeptis mengenai reunifikasi pun semakin berkurang, masyarakat juga mendukung upaya tersebut dan menyebutkan bahwa reunifikasi adalah tujuan utama bagi Korea Selatan saat ini. Kapan persisnya akan terjadi reunifikasi memang tidak bisa dipastikan, namun masyarakat tetap berharap akan hal tersebut.

Banyak hal yang melatarbelakangi keinginan reunifikasi dengan Korea Utara, sebesar 33.3% menyatakan untuk pertumbuhan ekonomi dan 28.7% untuk menghentikan ancaman perang. Direktur Youth and Future, Jung Hyung Gon, menyebutkan dalam surveinya ke universitas-universitas di Korea Selatan, 7 dari 10 (67.2%) mahasiswa mengatakan bahwa kerjasama yang lebih besar dengan Korea Utara sangat dibutuhkan. Selain itu beberapa dari mereka juga memilih untuk reunifikasi karena dianggap dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia baik di Korea Utara maupun di Korea Selatan sendiri, serta menghadirkan kedamaian di wilayah Asia Timur (Miller, 2018).

Hal ini berbanding terbalik dengan opini masyarakat mengenai AS. Asan Public Report melansir, awalnya, terutama di era pasca perang, masyarakat melihat AS sebagai pahlawan yang telah membantu Korea Selatan untuk kembali bangkit. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dimulai dari masa pemerintahan Roh Moo Hyun hingga Moon Jae In saat ini masyarakat mulai melihat AS justru sebagai hambatan bahkan ancaman bagi Korea Selatan.

Hambatan yang dimaksud adalah hambatan untuk reunifikasi. AS dianggap tidak bisa membantu Seoul untuk melakukan rekonsiliasi dengan Pyongyang karena upaya yang dilakukan selalu lewat jalur militer. Upaya negosiasi lebih disukai karena menurut masyarakat setelah bertahun-tahun cara militer belum juga memberikan hasil. Sementara itu, AS juga dianggap sebagai ancaman karena masyarakat melihat peningkatan hubungan dengan AS terutama dari sisi militer, tidak mengurangi ancaman nuklir dari Pyongyang. Pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya, semakin dekat Korea Selatan dengan AS semakin sering Korea Utara mengancam akan melakukan uji coba senjata nuklir. Misalnya, ketika tentara Korea Selatan beberapa kali sempat akan melakukan latihan militer bersama tentara AS, saat itu juga Korea Utara memberikan ancaman akan menembakkan rudalnya ke Seoul.

Berbeda dengan Korea Utara dan AS, hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang selalu dibayang-bayangi oleh pengalaman kelam di masa lalu. Luka mengenai kejamnya kolonialisasi Jepang di Korea Selatan sulit dihapuskan oleh masyarakat Korea. Mereka masih memandang bahwa Jepang adalah negara yang kejam, mereka masih menuntut permohonan maaf yang resmi dari pemerintahan Jepang terhadap korban-korban *comfort women*. Presiden Moon dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, pada bulan Juli 2017 berhasil menyelesaikan isu paling rumit di antar keduanya yaitu dengan melakukan kebijakan dua jalur yang memisahkan antara kerjasama keamanan dan sejarah (Kim, 2017, hal. 4). Meskipun

begitu, kesepakatan tersebut hanyalah kesepakatan tingkat tinggi yang sama sekali tidak berhubungan dengan masyarakat Korea Selatan. Oleh karena itu, sentimen terhadap Jepang di dalam masyarakat masih ada hingga saat ini. 60% masyarakat Korea Selatan masih menganggap Jepang sebagai ancaman militer.

Berbagai demonstrasi dan penolakan terhadap instalasi THAAD di Seongju, upaya normalisasi dengan Jepang, serta *blow up* media mengenai survey-survey yang dilakukan banyak institusi dilakukan untuk menunjukkan pada publik suara dari masyarakat Korea Selatan. Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Politik Internasional*, Coplin menyatakan bahwa *Mass influencers* tidak berperan untuk mempengaruhi proses pemilu, melainkan berperan untuk membentuk opini publik yang dapat berpengaruh terhadap pemilu selanjutnya. Opini publik memang bukan opini para ahli, namun hal ini dapat memberikan pengaruh yang konstan pada pandangan tentang pemerintah.

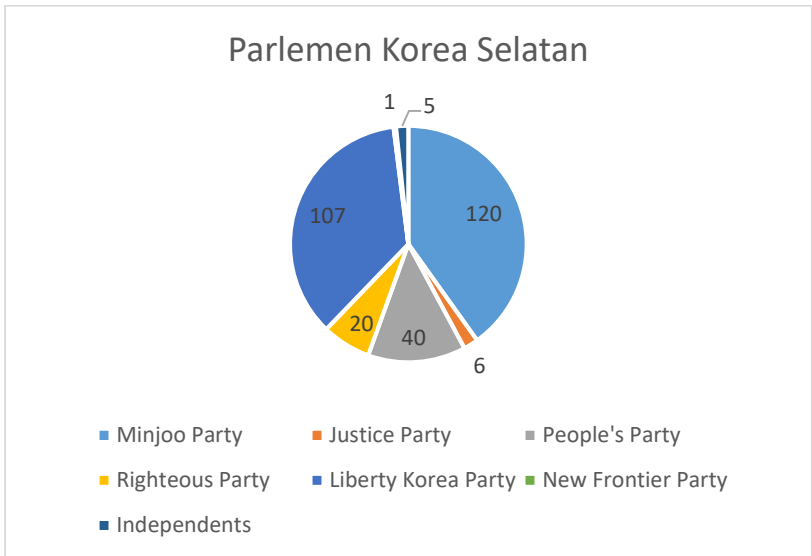
2. Partisan Influencers

Partai Demokrat (*Minjoo Party*), tempat Moon Jae In bernaung, telah dikenal sejak lama memang menentang instalasi THAAD sejak awal dan lebih memilih perbaikan hubungan dengan Korea Utara melalui jalur damai dan negosiasi. Sejak tahun 2016, di masa pemerintahan Park Geun Hye yang saat itu Partai Demokrat merupakan kelompok oposisi utama, melalui juru bicara andalannya Choo Mi Rae menyatakan menolak dengan keras instalasi THAAD di Seongju (Time, 2016).

Meskipun menjadi kelompok oposisi, dalam pemilihan legislatif pada bulan April 2012, Partai Minjoo memenangkan 123 kursi dibandingkan dengan 122 kursi yang dimenangkan oleh partai kanan-tengah Saenuri (Partai Liberal Korea), yang kehilangan mayoritas parlemen untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, menurut BBC.

Kini Partai Demokrat adalah partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen, sehingga keputusan dan persetujuan parlemen akan lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok ini (Time, 2016). Berikut adalah grafik pembagian kursi di parlemen Korea Selatan di masa pemerintahan Moon Jae In:

Grafik 4.1 Jumlah Kursi Parlemen Korea Selatan di Era Moon Jae In



Sumber: National Assembly (www.assembly.go.kr)

Pemerintahan Moon ingin mengambil langkah awal menuju rekonsiliasi dengan mencapai kesepakatan dengan Korea Utara mengenai sejumlah masalah di ranah sipil, termasuk menyatukan kembali keluarga yang telah terpisah, penggunaan bersama sumber daya air di daerah perbatasan, upaya bersama untuk memerangi malaria, dan partisipasi atlet Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Parlemen kubu Moon juga menyatakan keinginannya untuk membuka kembali Kaesong Industrial Complex (KIC) dan kembali menjalankan *Sunshine Policy* yang telah dihentikan selama 2 periode (Mosler, 2017, hal. 10).

Sejalan dengan pemulihan hubungan proaktif yang dicapai dengan memisahkan isu-isu politik dari proyek-proyek sipil dan ekonomi bersama, kubu Moon melihat perlunya mekanisme

pertahanan yang kuat dalam bentuk sistem pembunuh-rantai anti-misil yang Korea Selatan akan kembangkan sebagai cara yang efektif untuk melindungi diri terhadap rendahnya meratakan rudal dan pesawat terbang. Pada saat yang sama, Korea Utara dan Korea Selatan akan memperkenalkan sistem manajemen militer bersama untuk mencegah potensi kesalahpahaman dan kecelakaan. Selain itu, terdapat keinginan Korea Selatan untuk mendapatkan kembali *operational control (OPCON)* masa perang atas angkatan bersenjata, yang sekarang dipegang oleh AS, sehingga negara itu dapat membuat keputusan sendiri jika terjadi perang (Mosler, 2017, hal. 11).

Meskipun Partai Minjoo memiliki kursi terbanyak di parlemen, tetapi jumlahnya hanya berbeda 13 kursi dengan partai oposisi utama di Korea Selatan yaitu Partai Kebebasan Korea yang konservatif. Kebijakan-kebijakan mengenai Korea Utara seringkali ditolak oleh kelompok ini. Tetapi keputusan yang diambil pada akhirnya selalu berpihak pada rekonsiliasi dengan Korea Utara. Pada bulan Oktober 2018, Moon Jae In menyepakati kebijakan untuk rekonsiliasi dengan Pyongyang, ia menyatakan bahwa proses ini merupakan langkah awal menuju denuklirisasi Korea Utara. Kebijakan ini kemudian ditolak oleh partai oposisi (News Corps Australia Network, 2018).

Di Korea Selatan, terdapat hukum bahwa Presiden dapat meratifikasi suatu perjanjian mengenai Korea Utara tanpa dukungan parlemen dan inilah yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In setelah mendapat persetujuan dari Kabinet. Melalui juru bicara partai oposisi, Yoon Young Seok, kebijakan tersebut akan merusak *national security* dan menyia-nyiaikan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat (News Corps Australia Network, 2018).

Upaya untuk rekonsiliasi dan denuklirisasi Korea Utara memang telah menjadi tujuan utama bagi Partai Minjoo dan kader-kadernya termasuk Moon Jae In. Ia sangat yakin bahwa perjanjian awal mengenai rekonsiliasi ini akan membawa

dampak yang positif dan berakhir pada *complete denuclearization of North Korea*.

Menanggapi sikap Korea Selatan, bukan berarti AS kini bukan lagi sekutu bagi mereka. Sebaliknya, administrasi Moon terus melihat Washington sebagai penjamin paling penting dari keamanan negara. Pada saat yang sama, akan lebih banyak otonomi bagi Korea Selatan untuk mengatasi masalah-masalah di kawasan ini. Dengan demikian mencari kemitraan di antara yang sederajat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya dan, akhirnya, meninggalkannya. Dengan menggabungkan pemulihan hubungan dengan sanksi, negara akhirnya berharap untuk menandatangani perjanjian yang akan membawa perdamaian Semenanjung Korea untuk pelaksanaan program reformasinya (Mosler, 2017, hal. 11).

Apabila membahas mengenai kerjasama antara Korea Selatan dengan Jepang, pembahasan ini selalu kompleks. Tantangan yang paling sering dikutip untuk koordinasi kebijakan trilateral yang efektif adalah hubungan yang sulit antara Seoul dan Tokyo. Masalah yang dihadapkan pada politik memori perang, Seoul dan Tokyo mengalami kesulitan mengatasi sentimen yang muncul atas keluhan Korea Selatan terhadap perilaku kolonial dan masa perang oleh Jepang. Korea Utara membawa baik Tokyo dan Seoul bersama dalam kerja sama militer, namun strategi diplomatik mereka berpotensi memecah belah mereka (Smith, 2017, hal. 11).

Para ahli berpendapat bahwa, kerjasama kedua negara ini hanyalah dalam aspek kerjasama ekonomi karena keduanya merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi di Asia Timur. Tetapi akan sulit bagi keduanya untuk memperluas kerjasama ini ke bidang lain seperti politik maupun militer. Harapan mengenai kemajuan kerjasama antar keduanya sangat tipis. Dampak kolonialisme Jepang memang sangat dalam bagi Korea Selatan, sehingga walau bagaimanapun hal

ini akan selalu menjadi benteng bagi Korea Selatan untuk melakukan normalisasi dengan Jepang (Cook, 2016).

Sentimen Korea Selatan untuk memiliki militer Jepang di tanah Korea terus membatasi integrasi penuh perencanaan aliansi militer. Menjaga agar ketiga negara selaras saat diplomasi berlangsung akan menjadi sulit (Smith, 2017, hal. 11-12).

B. Pengaruh Politik Internasional

Tidak hanya faktor domestik, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi sebuah proses pengambilan kebijakan. Faktor politik internasional yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan sikap Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pembentukan *trilateral military alliance* ditujukan untuk menghadapi ancaman bersama bagi AS, Korea Selatan dan Jepang yaitu ancaman senjata nuklir dari Korea Utara, ancaman yang terus mengintai sejak berakhirnya perang dingin.

Seperi yang telah disampaikan di sub-bab sebelumnya bahwa upaya pembentukan *trilateral military alliance* telah ada sejak tahun 1990an dan seiring berjalannya waktu kedekatan antar tiga negara tersebut semakin meningkat. Menyadari adanya peningkatan hubungan antara Korea Selatan-AS-Jepang, Beijing mulai merasa tidak nyaman, ditambah lagi dengan upaya pembentukan aliansi militer antar ketiga negara tersebut. RRT menganggap *trilateral military alliance* justru akan membawa instabilitas keamanan di wilayah Asia Timur (Easley, 2017). Sejak 1990-an, RRT telah khawatir bahwa AS ingin membentuk aliansi seperti NATO di depan pintunya (Perlez, 2017).

Sebelumnya, AS dan Korea Selatan telah melakukan pertimbangan mengenai cara untuk menghadapi ancaman nuklir tersebut. Salah satu cara yang ditempuh oleh kedua negara ini adalah dengan instalasi *Terminal High Altitude Area Defense* atau biasa disebut THAAD. Kemudian ditambah lagi dengan disepakatinya perjanjian *Trilateral Information Sharing*

Agreement (TISA) untuk berbagi informasi antar intelijen yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang. Tetapi hal tersebut merupakan langkah yang berbahaya di mata Beijing, karena itu dapat merajut Tokyo dan Seoul lebih dekat dalam kerja sama militer. Maka kemungkinan besar lainnya yang muncul adalah aliansi militer antar Korea Selatan-AS-Jepang benar-benar terbentuk. Song Zhongping, seorang analis militer berbasis di RRT secara lebih jelas menyampaikan,

"This could mean a three-party alliance, rather than two-sided alliances [of the US and Japan, and the US and South Korea], and this would pose a damaging threat to the stability of Northeast Asia,"
(Zhou, 2016)

Mantan Mayor Jendral *People's Liberation Army* di RRT, Xu Guanyu, menyatakan apabila aliansi antara Korea Selatan, AS dan Jepang terbentuk maka hal tidak memberi para pemimpin RRT pilihan lain selain bersandar ke aliansi Beijing-Moskow sebagai upaya *counterbalance*. Tetapi dikhawatirkan hal ini akan memicu perlombaan senjata di Asia Timur (Zhou, 2016).

Sejak munculnya kekhawatiran itu, RRT belum mendapatkan momentum yang tepat untuk mencegah terbentuknya *trilateral military alliance*. Beijing perlu memberikan tekanan pada salah satu pihak dan pihak yang paling memungkinkan di mata mereka adalah Korea Selatan (Perlez, 2017).

Setelah TISA, yang RRT kira tidak akan bisa disepakati oleh Korea Selatan dan Jepang, di masa kepemimpinan Presiden Park Geun Hye, Korea Selatan kerap menolak usulan dari AS untuk memasang sistem anti-rudal berteknologi tinggi yang lebih efektif dan menggabungkan sistem independennya ke dalam jaringan gabungan yang komprehensif (Klinger, 2015, hal. 22). Rencana pemasangan THAAD di Korea Selatan pun menjadi momentum bagi RRT. Banyak kontroversi terkait dengan penolakan instalasi THAAD serta adanya tekanan dari RRT.

RRT yang menentang hal ini—serta kekhawatiran akan terbentuknya kerjasama lain yang lebih besar—memberikan sanksi *unofficial* kepada Korea Selatan dalam beberapa aspek yaitu sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik. Beberapa pertemuan antar pejabat pemerintah dibatalkan secara sepihak. Dari bidang ekonomi, RRT memboikot industri hiburan, ekspor-impor barang dan jasa serta pariwisata Korea Selatan (Easley, 2017). Beberapa acara yang menampilkan musik pop Korea Selatan (K-pop) dan aktor ditangguhkan atau dibatalkan tanpa penjelasan. China Central Television (CCTV), saluran TV milik negara, melaporkan bahwa regulator siaran pemerintah memiliki melarang penayangan acara TV Korea Selatan. Sejak Juli 2016, RRT memblokir akses barang dan jasa dari Korea Selatan. Pada bulan Maret 2017, Regulator RRT melarang penjualan beberapa produk Korea Selatan, termasuk jenis pembersih udara tertentu, kursi toilet berteknologi tinggi, dan kosmetik, dengan alasan keamanan. RRT juga melarang kunjungan wisata ke Korea Selatan. Hingga di tahun 2017 angka wisatawan yang masuk ke Korea Selatan turun hingga 66% karena memang mayoritas wisatawan datang dari negeri Tirai Bambu tersebut (Meick & Salidjanova, 2017, hal. 7). Akibatnya hubungan ekonomi kedua negara terganggu dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Korea Selatan.

Setelah diturunkannya Presiden Park Geun Hye, Presiden terpilih Moon Jae In, disebut-sebut menjadi harapan baru bagi warga Korea Selatan terutama untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara serta mengatasi masalah dengan RRT. Tidak lama setelah terpilih menjadi Presiden pada bulan Mei 2017, Moon Jae In menghubungi Presiden RRT, Xi Jinping. Keduanya sepakat untuk melakukan pertemuan sesegera mungkin (Panda, 2017).

Setelah terpilihnya Presiden Moon Jae In, RRT mulai menunjukkan perubahan sikap atas Korea Selatan, kemurkaan ekonomi RRT tampak mulai mengalami penurunan tensi. Meskipun hampir seluruh *store* Lotte masih ditutup, namun pertunjukan musik Korea Selatan atau *K-Pop* (*korean Pop*) mulai dilaksanakan kembali pada bulan Juni. Maskapai

penerbangan RRT, Spring Airline, mulai menjadwalkan ulang penerbangan menuju Korea Selatan atas kembalinya turis-turis RRT yang melakukan perjalanan ke negeri ginseng tersebut (Meick & Salidjanova, 2017, hal. 8).

Moon Jae In bertemu pertama kali dengan Xi Jinping pada bulan Juli pada *G20 Summit* di Jerman. Sayangnya, dalam pertemuan tersebut kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Namun, ia masih terus berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan RRT. Dalam *APEC Summit* yang dilaksanakan di Da Nang, Vietnam, Moon Jae In kembali dijadwalkan untuk bertemu dengan Xi Jinping. Di pertemuan kali ini, ia berfokus pada peningkatan dan normalisasi kerjasama ekonomi antar dua negara. Moon juga mengajak RRT untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemberian sanksi terhadap nuklir Korea Utara. Hal ini dikarenakan kedekatan antara RRT dan Korea Utara. Beijing juga sebelumnya telah menyatakan menolak pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan meminta Pyongyang untuk denuklirisasi (Dong-A Ilbo, 2017).

Pada bulan Desember 2017, Moon Jae In melakukan kunjungan pertamanya ke RRT dan pertemuan ketiganya dengan Xi Jinping. Dikutip dalam wawancara *South China Morning Post*, Moon Jae In menyebutkan bahwa tujuan utama dalam kunjungan ini adalah untuk membangun kembali kepercayaan antar kedua negara sebagaimana yang telah terjalin selama 25 tahun terakhir. Dalam pertemuan ini juga sempat dibahas mengenai THAAD. Kedua pemimpin berbicara *heart to heart* mengenai pandangannya akan masalah ini. Disebutkan bahwa Beijing memahami tujuan dipasangnya sistem pertahanan anti rudal tersebut dan yakin bahwa sistem yang terpasang saat ini memang tidak diarahkan untuk RRT (Weibing, 2017).

Tetapi, kekhawatiran lainnya bagi RRT tetap ada, yakni kemungkinan dibentuknya sistem lain mirip THAAD yang digunakan oleh Korea Selatan, AS dan Jepang untuk “memata-matai” RRT (Perlez, 2017). Oleh karena itu, RRT sepakat untuk melakukan perbaikan ekonomi dan mencabut sanksinya asalkan Korea Selatan mampu memenuhi 3 syarat. Beijing kemudian menawarkan perjanjian baru yang disebut sebagai *three nos*:

1. tidak ada tambahan instalasi THAAD di Korea Selatan (dalam hal ini tambahan yang dimaksud ialah baterai maupun *launcher*);
2. tidak ada partisipasi dalam sistem pertahanan rudal strategis bersama AS;
3. tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral Korea Selatan-AS-Jepang (Panda, 2017).

Menanggapi penawaran ini, Korea Selatan menyatakan secara publik untuk patuh terhadap *three nos* (Abrahamian & Son, 2017). Setelah pernyataan tersebut dan mulai menjaga jarak dengan AS maupun Jepang. Keputusan Moon tersebut tidak disukai oleh AS, Korea Selatan dianggap telah menyerah dengan berbagai tekanan dan gertakan dari RRT. Tetapi, keputusan ini kemudian didukung dengan sikap Moon Jae In yang dalam sebuah interview dengan *News Asia Singapore* menyatakan,

"South Korea-U.S. military cooperation as well as Japan has become important, but the cooperation is aimed at countering North Korea's nuclear and missile provocations. But I don't think it is appropriate to develop the cooperation to a level of (trilateral) military alliance." (Yonhap News, 2017)

Berdasarkan pada upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Moon untuk memperbaiki hubungan dengan RRT, setelah pertemuan kedua kepala negara, Moon Jae In dan Xi Jinping pada Desember 2017, sanksi yang diberikan RRT mulai melonggar.

Dapat diamati bahwa instalasi THAAD kemudian menjadi momentum bagi RRT untuk mencegah terbentuknya aliansi bagi Korea Selatan, AS dan Jepang (Perlez, 2017). Meskipun pada akhirnya THAAD tetap dipasang di Korea Selatan atas pengertian dari RRT, tetapi baterai yang sudah terinstal disana tidak akan bertambah sesuai dengan perjanjian *three nos* yang telah disepakati.

Melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Moon Jae In untuk memperbaiki hubungan negaranya dengan RRT,

beberapa pengamat mengaitkan hal ini dengan posisi RRT terhadap Korea Selatan. Seperti yang dibahas dalam sub bab sebelumnya bahwa kondisi domestik Korea Selatan lebih menginginkan adanya perbaikan hubungan dengan Korea Utara, maka hal ini menjadi perhatian bagi pemerintahan Moon Jae In. Korea Selatan menganggap bahwa RRT adalah salah satu negara yang “dekat” dengan Korea Utara. Ditambah lagi dengan pernyataan Beijing bahwa mereka juga sepakat terhadap denuklirisasi Pyongyang hal ini dianggap sebagai sebuah peluang bagi Seoul untuk membawa kembali Korea Utara ke meja perundingan dan menghentikan uji coba nuklirnya. Perwakilan dari *Blue House* menyatakan,

“Coming amid a thaw in South Korea-China relations, [the remarks] are significant in pressing China to emphasize its role and show a more active attitude on resolving the North Korean nuclear issue,” (Seong, 2017)

Pada bulan Desember lalu, Korea Selatan dan RRT menyepakati empat prinsip untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, yang terdiri dari 1) perang di Semenanjung Korea tidak dapat ditoleransi; 2) prinsip denuklirisasi Semenanjung Korea akan dipelihara dengan baik; 3) semua masalah, termasuk denuklirisasi Korea Utara, akan diselesaikan secara damai melalui dialog dan negosiasi; dan 4) peningkatan hubungan antar-Korea akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan Semenanjung Korea (McGuire, 2018). Melihat sikap dari Korea Selatan yang menyepakati perjanjian *three nos* bersama RRT, maka dapat dikatakan bahwa akan sulit bagi *trilateral military alliance* untuk terbentuk antara Korea Selatan-AS-Jepang (Park, 2017).